

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini keberadaan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk membantu masalah permodalan UMKM di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2021, dikutip dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021) bahwa pada bulan Maret 2021 jumlah UKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 60 juta unit dan berkontribusi terhadap pendapatan nasional sebesar 8.537,89 triliun rupiah. Angka tersebut bukanlah angka yang kecil dan cukup berpengaruh.

Menurut publikasi hasil perhitungan nilai tambah koperasi dan UMKM di Jawa Timur tahun 2020, Provinsi Jawa Timur berhasil memperoleh besaran Nilai Tambah Bruto (NTB) sebesar Rp1.316,39 triliun (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, 2021). Walaupun mengalami penurunan dari tahun 2019 karena adanya dampak pandemi Covid-19, tetapi angka tersebut masih lebih besar peningkatannya dari tahun 2018. Dari angka tersebut terdapat beberapa sektor yang mendominasi besaran nilai tambah koperasi dan UMKM, yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan pertanian, kehutanan dan perikanan, serta yang

cukup menarik untuk dibahas pada karya tulis ini adalah sektor konstruksi. Sektor konstruksi berada di posisi keempat dengan persentase sebesar 10,75 persen atau senilai dengan 141,45 triliun rupiah.

Karena peranannya yang sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia, maka para pelaku UMKM juga harus turut berkontribusi agar usahanya mengalami perkembangan yang berkelanjutan, tidak hanya sekadar menghasilkan laba tahunan. Selain mengembangkan barang yang diproduksi dan meningkatkan pelayanan jasa usaha, salah satu cara agar UMKM dapat berkembang adalah dengan melakukan proses pencatatan akuntansi yang baik. Proses pencatatan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dapat menjadi indikasi bahwa pelaku usaha tersebut melakukan kegiatan usahanya secara sehat. Selain itu, kewajaran laporan keuangan juga dapat menjadi indikasi bahwa pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya dengan baik. Dengan begitu, beberapa pengguna laporan keuangan seperti investor atau kreditur akan bersedia untuk memberikan bantuan pendanaan kepada pelaku usaha. Tidak hanya diuntungkan dari sisi pendanaan, pelaku usaha juga akan dimudahkan dalam melaporkan pajak penghasilan badan kepada pemerintah setiap bulannya.

Dalam membuat laporan keuangan yang wajar, pendapatan menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan. Pendapatan dapat menggambarkan performa kinerja perusahaan dan menjadi pertimbangan investor dalam mengambil keputusan. Karena memperoleh pendapatan merupakan kegiatan utama perusahaan, maka akuntansi yang bersangkutan pun sering terjadi dan meningkatkan risiko kemungkinan kecurangan dan kesalahan dalam pencatatan. Kesalahan dapat muncul dari waktu

pengakuan pendapatan yang tidak tepat, pengakuan nominal pendapatan yang tidak sesuai, dan kemungkinan kesalahan lainnya. Kesesuaian antara pengakuan pendapatan yang dilakukan pelaku usaha dengan standar akuntansi yang berlaku merupakan salah satu cara untuk mendeteksi adanya kesalahan pencatatan pendapatan.

Di Indonesia, akuntansi pendapatan diatur dalam PSAK 72 tentang Pengakuan Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 Juli 2017. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini menggantikan seluruh standar akuntansi mengenai pengakuan pendapatan seperti PSAK 23 tentang Pendapatan, PSAK 34 tentang Konstruksi, PSAK 10 tentang Program Loyalitas Pelanggan, PSAK 21 tentang Perjanjian Konstruksi Real Estat, PSAK 27 tentang Pengalihan Aset dari Pelanggan, dan PSAK 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat (Ikatan Akuntan Indonesia, n.d.).

Dalam praktiknya, PSAK 72 dianggap terlalu kompleks bagi pelaku UMKM karena sumber daya yang dimiliki terbatas. Hal ini menyebabkan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh pelaku UMKM tidak sesuai dengan PSAK 72. Oleh karena itu, untuk memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dapat digunakan sebagai pedoman pencatatan pendapatan oleh pelaku UMKM. SAK ETAP mengartikan pelaku usaha tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagai pelaku usaha yang tidak menerbitkan laporan keuangan untuk

tujuan umum bagi pengguna. Dalam SAK ETAP, akuntansi pendapatan atas penjualan barang, pendapatan atas pemberian jasa, pendapatan kontrak konstruksi, dan pendapatan dari penggunaan aset oleh entitas lain secara detail diatur dalam bab 20 tentang Pendapatan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Standar akuntansi keuangan ini disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan–Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) pada 19 Mei 2009 dan mulai diterapkan setelah 1 Januari 2011.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai pentingnya kesesuaian pengakuan pendapatan oleh pelaku UMKM dalam kontribusi perekonomian Indonesia, maka penulis akan melakukan kajian lebih lanjut yang ditulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Atas Pengakuan Pendapatan PT Tri Widjaya Makmur Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang sebelumnya, beberapa rumusan masalah yang timbul antara lain:

1. Bagaimana metode pengakuan pendapatan yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)?
2. Bagaimana perlakuan pendapatan yang dilakukan PT Tri Widjaya Makmur selama tahun 2020?
3. Bagaimana kesesuaian antara pengakuan pendapatan yang dilakukan PT Tri Widjaya Makmur selama tahun 2020 dengan pengakuan pendapatan yang diatur

dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ini penulis memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengetahui metode pengakuan pendapatan yang ditetapkan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
2. Mengetahui perlakuan pendapatan yang dilakukan PT Tri Widjaya Makmur selama tahun 2020.
3. Mengetahui kesesuaian antara pengakuan pendapatan yang dilakukan PT Tri Widjaya Makmur dengan pengakuan pendapatan yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis akan membahas mengenai proses akuntansi pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT Tri Widjaya Makmur selama periode akuntansi 2020. Pendapatan dapat berupa pendapatan yang muncul akibat transaksi penjualan barang, transaksi pemberian jasa, transaksi kontrak konstruksi, transaksi penggunaan aset PT Tri Widjaya Makmur oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, atau dividen yang diatur dalam bab 20 dan pendapatan lainnya yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Pendapatan lainnya dapat berupa pendapatan dari perjanjian sewa yang diatur pada bab 17, pendapatan dari dividen yang diatur

pada bab 12, dan pendapatan dari perubahan nilai wajar yang diatur pada bab 10 jika ada.

1.5 Manfaat Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis berharap agar bisa memberikan manfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi pihak internal PT Tri Widjaya Makmur, bagi masyarakat umum, dan bagi penulis. Manfaat-manfaat tersebut antara lain:

1. Memberi pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai pengakuan pendapatan yang sesuai dengan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi pelaku usaha tanpa akuntabilitas publik.
2. Memberi pengetahuan kepada PT Tri Widjaya Makmur selaku pelaku usaha tanpa akuntabilitas publik mengenai akuntansi pengakuan pendapatan yang benar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
3. Menambah wawasan kepada penulis mengenai kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan diharapkan dapat menambah pengalaman penulis sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan penelitian berikutnya.

.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini membahas mengenai latar belakang dibuatnya Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA), rumusan masalah yang timbul dari latar belakang, tujuan penulisan KTTA, ruang lingkup penulisan KTTA, manfaat penulisan dan diakhiri dengan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini akan menjelaskan teori atau ketentuan yang relevan dengan permasalahan yang muncul dalam KTTA. Bagian ini akan menjadi pedoman atau landasan bagi penulis untuk melakukan tinjauan atas perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT Tri Widjaya Makmur sebagai objek penulisan karya tulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data, menjelaskan gambaran umum usaha PT Tri Widjaya Makmur sebagai objek KTTA, dan menjelaskan mengenai hasil tinjauan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT Tri Widjaya Makmur dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

BAB IV SIMPULAN

Bagian ini memuat simpulan yang diperoleh dari penjelasan di bab-bab sebelumnya serta diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penulisan KTTA.